

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan *soko guru* perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja nasional, penelitian menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 60 % terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 90 % tenaga kerja di Indonesia, sehingga keberadaan UMKM terbukti menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kecil (Janah & Tampubolon, 2024). Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa penguatan dan pengembangan UMKM menjadi salah satu upaya penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Diatmika, Yuniarta, et al., 2021). Sejalan dengan kontribusi UMKM tersebut, subsektor budidaya perikanan air tawar menunjukkan tren perkembangan yang signifikan sebagai bentuk diversifikasi usaha di sektor agribisnis dan akuakultur, kini menjadi salah satu sektor yang mendukung penyediaan sumber daya perikanan, meningkatkan pendapatan petani-skala kecil, dan memperluas peluang usaha di kawasan pedesaan maupun urban (Verdegem dkk., 2023).

Di antara berbagai komoditas budidaya air tawar, ikan koi (*Cyprinus spp.*) menonjol sebagai komoditas ikan hias bernilai ekonomi tinggi. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa nilai ekspor ikan hias Indonesia pada

tahun 2023 mencapai sekitar USD 36 juta, dengan tren permintaan yang terus meningkat di pasar internasional seperti Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat. Salah satu jenis ikan hias yang memiliki nilai jual tinggi adalah ikan koi, yang dapat mencapai harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah per ekor tergantung pada kualitas warna, pola, ukuran, dan keturunannya (Andrian et al., 2024). Karakteristik usaha budidaya ikan koi berbeda dengan usaha agrikultur lain karena kebutuhan modal awal yang relatif besar, terutama untuk pembelian indukan (*broodstock*) berkualitas tinggi dan fasilitas produksi seperti kolam serta pakan khusus; selain itu, siklus produksi budidaya koi yang berulang mulai dari pemijahan, pembesaran, hingga panen benih dan ikan siap jual menuntut manajemen biaya yang efektif dan sistematis, khususnya dalam konteks penentuan harga pokok produksi agar usaha dapat tetap berkelanjutan dan kompetitif di pasar (Masyrurroh & Firmani, 2024).

Usaha budidaya ikan koi merupakan salah satu bentuk kegiatan akuakultur yang memiliki potensi ekonomi cukup menjanjikan karena tingginya permintaan pasar terhadap ikan hias dengan kualitas tertentu. Budidaya ikan koi tidak hanya berkembang sebagai aktivitas hobi, tetapi juga telah menjadi peluang usaha yang mampu memberikan nilai ekonomi bagi pelaku usaha skala kecil hingga menengah. Kegiatan budidaya ini umumnya melibatkan proses pemijahan, pemeliharaan benih, hingga pembesaran ikan sebelum dipasarkan, sehingga memerlukan pengelolaan produksi dan biaya yang baik agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya yang efisien menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas operasional dan keberlanjutan usaha, sehingga setiap sumber daya yang digunakan dalam proses produksi perlu dikelola secara optimal (Diatmika, Krisna, et al., 2021).

Salah satu usaha budidaya ikan koi yang berkembang di Kabupaten Buleleng adalah usaha milik Komang Sudirpa yang berlokasi di Dusun Jembong, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada. Usaha ini pada awalnya berawal dari hobi keluarga dalam memelihara ikan hias yang telah dilakukan sejak sekitar lima belas tahun yang lalu. Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya minat terhadap ikan koi, kegiatan tersebut kemudian berkembang menjadi usaha budidaya yang mulai diperjualbelikan secara komersial dalam kurun waktu sekitar tujuh tahun terakhir. Dalam menjalankan usahanya, Komang Sudirpa juga aktif bergabung dengan komunitas pecinta dan pembudidaya ikan koi untuk memperoleh informasi mengenai teknik budidaya serta pemasaran ikan koi. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara awal diketahui bahwa pengelolaan keuangan usaha masih dilakukan secara sederhana, yaitu dengan mencatat arus kas berupa uang keluar dan uang masuk tanpa melakukan perhitungan biaya produksi secara rinci. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha belum memiliki perhitungan harga pokok produksi yang komprehensif sebagai dasar dalam menentukan harga jual produk.

Dalam kegiatan usaha budidaya ikan koi, proses produksi melibatkan berbagai komponen biaya yang harus dikelola secara efektif agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya pakan, tenaga kerja, perawatan kolam, obat-obatan, serta penggunaan indukan sebagai sumber produksi benih. Dalam konteks akuntansi biaya, seluruh komponen biaya yang digunakan dalam proses produksi seharusnya diperhitungkan secara sistematis untuk memperoleh harga pokok produksi (HPP) yang akurat sebagai dasar dalam penentuan harga jual produk. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan pemilik usaha budidaya ikan koi milik Komang Sudirpa, diketahui

bahwa pengelolaan biaya produksi dalam usaha tersebut masih dilakukan secara sederhana. Pencatatan yang dilakukan lebih berfokus pada arus kas berupa uang keluar dan uang masuk tanpa melakukan pengelompokan biaya secara rinci sesuai dengan unsur-unsur biaya produksi, sehingga informasi keuangan yang dihasilkan belum mampu menggambarkan kondisi biaya usaha secara menyeluruh (Ekawati et al., 2025).

Selain itu, salah satu komponen biaya yang memiliki peran penting dalam kegiatan budidaya ikan koi adalah indukan (*broodstock*) yang digunakan sebagai sumber produksi benih. Indukan memiliki nilai investasi yang relatif besar dan digunakan secara berulang dalam beberapa siklus pemijahan. Meskipun demikian, dalam praktiknya biaya perolehan indukan belum dialokasikan secara sistematis dalam perhitungan biaya produksi. Hal tersebut menyebabkan biaya produksi yang dihitung belum sepenuhnya mencerminkan seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses budidaya ikan koi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha, dalam satu siklus pemijahan ikan koi dapat dihasilkan sekitar 4.500 ekor benih ikan yang siap dipasarkan setelah melalui masa pemeliharaan selama kurang lebih tiga bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% atau 2.700 ekor merupakan ikan koi polos, sedangkan 40% atau 1.800 ekor merupakan ikan koi bercorak yang terdiri atas kategori *high quality* dan *super quality*. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan adanya perbedaan harga jual antara ikan koi polos dan ikan koi bercorak. Ikan koi polos dengan ukuran rata-rata ± 10 cm umumnya dijual dengan harga sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 per ekor, sedangkan ikan koi bercorak dijual dengan harga rata-rata sekitar Rp15.000 per ekor. Dengan asumsi harga jual rata-rata sebesar Rp3.500 per ekor untuk ikan koi polos dan Rp15.000 per ekor untuk

ikan koi bercorak, maka potensi pendapatan kotor yang dapat diperoleh dalam satu siklus produksi mencapai sekitar Rp36.450.000. Besarnya potensi pendapatan tersebut menunjukkan bahwa usaha budidaya ikan koi memiliki prospek usaha yang cukup menjanjikan. Oleh karena itu, pelaku usaha memerlukan informasi biaya produksi yang akurat sebagai dasar dalam menghitung harga pokok produksi, mengevaluasi kinerja usaha, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat (Yuniarta et al., 2021).

Meskipun usaha budidaya ikan koi tersebut memiliki potensi pendapatan yang cukup besar, pengelolaan aspek biaya produksi dalam usaha ini belum dilakukan secara terperinci. Berdasarkan hasil wawancara, pemilik usaha belum melakukan pencatatan dan perhitungan biaya produksi secara sistematis dalam setiap siklus pemijahan. Berbagai komponen biaya seperti biaya pakan, perawatan kolam, obat-obatan, tenaga kerja, serta penggunaan indukan sebagai sumber produksi benih tidak dicatat dan dihitung secara rinci sebagai bagian dari biaya produksi. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha belum mengetahui secara pasti besarnya harga pokok produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan benih ikan dalam satu siklus pemijahan. Padahal, ketersediaan informasi akuntansi yang memadai melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas sebagai dasar pengambilan keputusan usaha (Paramitha & Yuniarta, 2024).

Akibatnya, meskipun terdapat estimasi pendapatan dari penjualan benih ikan koi, pelaku usaha tidak memiliki informasi yang jelas mengenai besarnya laba yang sebenarnya diperoleh. Hal ini disebabkan karena perhitungan pendapatan yang dilakukan hanya didasarkan pada hasil penjualan tanpa memperhitungkan

secara detail seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Dengan demikian, laba yang diperoleh dari usaha budidaya ikan koi tersebut belum dapat mencerminkan kondisi keuntungan yang sebenarnya, karena tidak didasarkan pada perbandingan yang jelas antara total pendapatan dengan harga pokok produksi yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha budidaya ikan koi, ditemukan sejumlah permasalahan mendasar dalam pengelolaan usaha, khususnya pada aspek keuangan dan penentuan biaya. Pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana dan terbatas pada arus kas masuk dan keluar tanpa pengelompokan biaya produksi yang rinci, sehingga informasi biaya tidak tersaji secara komprehensif. Selain itu, usaha belum melakukan perhitungan harga pokok produksi (HPP) secara menyeluruh, yang menyebabkan biaya produksi sebenarnya tidak diketahui secara pasti. Permasalahan ini diperparah dengan belum adanya klasifikasi biaya produksi yang sistematis, baik untuk bahan, tenaga kerja, maupun *overhead*. Di sisi lain, biaya perolehan indukan sebagai aset produktif juga belum dialokasikan dalam perhitungan biaya produksi, sehingga mengurangi akurasi penghitungan biaya. Akibatnya, penentuan harga jual produk cenderung dilakukan berdasarkan perkiraan atau mengikuti harga pasar tanpa didukung oleh perhitungan HPP yang tepat, yang berpotensi memengaruhi tingkat keuntungan usaha.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam penentuan harga pokok produksi dan harga jual produk. Tanpa adanya perhitungan biaya produksi yang komprehensif, pelaku usaha cenderung menentukan harga jual berdasarkan perkiraan atau mengikuti harga pasar yang berlaku, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan antara biaya produksi yang sebenarnya dengan

harga jual yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belum diperhitungkannya seluruh komponen biaya produksi dapat menghasilkan informasi harga pokok produksi yang kurang akurat sehingga diperlukan metode perhitungan biaya yang lebih komprehensif (Dipya & Martadinata, 2024). Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan perhitungan biaya yang mampu mengalokasikan seluruh komponen biaya produksi secara lebih sistematis, salah satunya melalui pendekatan *full costing* dalam penentuan harga pokok produksi.

Harga Pokok Produksi (HPP) merupakan parameter kunci dalam akuntansi biaya karena menjadi dasar dalam penentuan harga jual produk, di mana perhitungan yang akurat memungkinkan perusahaan atau pelaku usaha untuk menetapkan harga jual yang tepat sesuai biaya yang terjadi selama proses produksi sehingga dapat menjamin margin keuntungan yang diinginkan (Jillsticia Rembet, Victorina Z. Tirayoh, 2024). Dalam konteks ini, penentuan HPP bukan sekadar pencatatan biaya produksi, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk evaluasi efisiensi operasional, karena HPP mencerminkan seluruh biaya yang telah dikonsumsi dalam menghasilkan produk hingga siap dijual yang kemudian menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait pengendalian biaya dan strategi pemasaran (Purnama dkk., 2019). Kesalahan dalam penghitungan HPP dapat menyebabkan penentuan harga jual menjadi tidak kompetitif di pasar, karena apabila HPP per unit ditetapkan terlalu tinggi akan mendorong harga jual yang tidak menarik bagi konsumen dan mengurangi daya saing produk; sebaliknya, apabila HPP terlalu rendah sebagai akibat pengabaian beberapa komponen biaya, harga jual mungkin tidak mencukupi untuk menutup biaya produksi sebenarnya sehingga

berpotensi menghasilkan laba semu ataupun bahkan kerugian tersembunyi di balik penjualan yang terlihat menguntungkan (Nusgiyanti & Jefri, 2025).

Selain itu, struktur biaya pada usaha budidaya, termasuk dalam budidaya ikan koi, cenderung kompleks karena melibatkan berbagai unsur biaya seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, *overhead*, serta komponen biaya tidak langsung lainnya yang harus dialokasikan secara tepat; kesalahan dalam mengidentifikasi dan menghitung komponen biaya tersebut dapat memengaruhi total HPP dan implikasi bisnisnya, sehingga pemahaman yang mendalam tentang unsur biaya menjadi sangat penting dalam akuntansi biaya untuk mendapatkan HPP yang sesuai dengan kondisi produksi nyata (Murniati, 2025). Dalam perspektif manajerial, HPP juga berperan sebagai alat evaluasi efisiensi dan pengendalian biaya, karena dengan mengetahui struktur serta jumlah HPP secara rinci, manajemen dapat menilai area-area biaya yang kurang efisien sehingga dapat diambil tindakan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas dan profitabilitas usaha (Yunita dkk., 2024).

Dalam akuntansi biaya, penentuan harga pokok produksi memerlukan metode perhitungan yang mampu mencerminkan seluruh biaya yang dikonsumsi dalam proses produksi. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah metode *full costing*, yaitu metode penentuan biaya produksi yang memasukkan seluruh unsur biaya produksi, baik biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, maupun biaya *overhead* pabrik yang bersifat tetap maupun variabel (Izzadieny et al., 2024; Astri, 2021). Pendekatan ini dianggap mampu memberikan gambaran biaya produksi yang lebih komprehensif karena seluruh pengorbanan ekonomi yang terjadi selama proses produksi dialokasikan ke dalam produk yang dihasilkan. Dengan demikian, penerapan metode *full costing* dapat menghasilkan

perhitungan harga pokok produksi yang lebih akurat serta mendukung pengambilan keputusan manajerial, khususnya dalam penentuan harga jual produk (Octaviano & Rahmah, 2026; Satmono dkk., 2025).

Dalam konteks usaha budidaya ikan koi, pendekatan *full costing* menjadi relevan karena proses produksi melibatkan berbagai komponen biaya yang saling berkaitan, termasuk penggunaan indukan sebagai sumber produksi benih. Indukan sebagai aset produktif secara ekonomi mengalami konsumsi manfaat selama digunakan dalam proses pemijahan berulang sehingga biaya perolehannya secara rasional perlu dialokasikan dalam perhitungan biaya produksi. Apabila biaya tersebut tidak diperhitungkan secara sistematis, maka harga pokok produksi yang dihasilkan berpotensi tidak mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya. Oleh karena itu, diperlukan metode alokasi biaya yang lebih sistematis dan rasional melalui pendekatan *full costing* agar seluruh komponen biaya produksi dapat diperhitungkan secara menyeluruh dalam menentukan harga pokok produksi usaha budidaya ikan koi.

Penelitian mengenai aset biologis pada sektor agrikultur menunjukkan bahwa implementasi standar akuntansi, khususnya PSAK 69, masih belum optimal pada entitas skala UMKM. Penelitian Sujana dan Yudiantara (2022) menemukan bahwa pengakuan aset biologis dan produk agrikultur pada usaha ayam petelur telah mengacu pada standar, namun pengukuran belum dilakukan secara menyeluruh serta penyajian dan pengungkapan masih sederhana dan belum sesuai SAK-EMKM. Sejalan dengan itu, Adi Erawan dan Julianto (2020) mengungkapkan bahwa usaha produksi telur ayam belum menerapkan perlakuan akuntansi aset biologis sesuai PSAK 69 akibat keterbatasan pengetahuan dan

sumber daya manusia, bahkan produk agrikultur masih diperlakukan sebagai persediaan biasa.

Selain itu, Mahendra dan Diatmika (2020) menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset biologis pada usaha peternakan sapi juga belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 69, terutama dalam hal pengukuran yang masih menggunakan biaya historis dan pencatatan yang sederhana. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak hanya pada aspek pengakuan, tetapi juga pada pengukuran dan pengalokasian biaya aset biologis yang belum tepat. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidakakuratan dalam perhitungan harga pokok produksi. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis alokasi biaya aset biologis dalam perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode *full costing* pada usaha ikan koi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih akurat dan relevan dalam praktik akuntansi sektor perikanan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas mengenai perhitungan harga pokok produksi dalam berbagai jenis usaha, khususnya dalam konteks penerapan metode *full costing* maupun metode akuntansi biaya lainnya untuk meningkatkan akurasi penentuan harga jual produk (Izzadieny et al., 2024). Penelitian tersebut umumnya menekankan pentingnya pengalokasian seluruh komponen biaya produksi dalam proses penentuan harga pokok produksi agar dapat memberikan informasi biaya yang lebih akurat bagi manajemen. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada sektor manufaktur atau usaha produksi pada umumnya, sehingga pembahasan mengenai penerapan metode perhitungan biaya produksi pada sektor budidaya perikanan, khususnya dalam mengalokasikan biaya aset biologis seperti indukan, masih relatif terbatas. Padahal,

dalam usaha budidaya ikan koi, indukan memiliki peran penting sebagai aset produktif yang digunakan secara berulang dalam proses produksi benih sehingga secara ekonomi mengalami konsumsi manfaat selama masa penggunaannya.

Selain itu, penelitian yang secara khusus membahas mengenai metode alokasi biaya indukan dalam perhitungan harga pokok produksi pada usaha budidaya ikan koi juga masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait bagaimana metode alokasi biaya indukan dapat diterapkan secara sistematis dalam perhitungan harga pokok produksi menggunakan pendekatan *full costing*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode alokasi biaya aset biologis indukan dalam penentuan harga pokok produksi pada usaha budidaya ikan koi serta menghitung dampaknya terhadap besarnya harga pokok produksi yang dihasilkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pelaku usaha budidaya ikan koi dalam menyusun perhitungan biaya produksi yang lebih komprehensif sehingga dapat mendukung penentuan harga jual yang lebih tepat serta meningkatkan efisiensi pengelolaan usaha.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Permasalahan pertama terletak pada aspek pencatatan keuangan, di mana usaha budidaya ikan koi masih menerapkan sistem pencatatan yang sangat sederhana. Pencatatan yang dilakukan hanya sebatas pada arus kas masuk dan keluar, tanpa adanya pengelompokan biaya produksi secara rinci.

Kondisi ini menyebabkan informasi keuangan yang dihasilkan menjadi kurang komprehensif dan tidak mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur biaya usaha secara keseluruhan.

2. Permasalahan berikutnya tentang perlakuan indukan sebagai aset produktif. Biaya perolehan indukan belum dialokasikan ke dalam perhitungan biaya produksi, padahal indukan memiliki peran penting dalam proses produksi ikan koi. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset biologis belum dilakukan secara tepat, sehingga dapat memengaruhi akurasi perhitungan biaya produksi.
3. Terakhir, pada aspek penentuan harga jual, usaha cenderung menetapkan harga berdasarkan perkiraan atau mengikuti harga pasar. Penentuan harga yang tidak didasarkan pada perhitungan HPP yang akurat berpotensi menyebabkan harga jual tidak mencerminkan biaya produksi yang sebenarnya, sehingga dapat berdampak pada tingkat keuntungan yang diperoleh usaha.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis perlakuan dan pengalokasian biaya indukan sebagai aset biologis dalam perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode *full costing* pada usaha budidaya ikan koi milik Komang Sudirpa yang berlokasi di Dusun Jembong, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Fokus penelitian meliputi identifikasi seluruh komponen biaya produksi sesuai pendekatan *full costing*, penentuan metode pengalokasian biaya indukan sebagai aset biologis ke dalam harga pokok produksi benih ikan koi,

serta analisis dampak pengalokasian biaya indukan terhadap besarnya harga pokok produksi dan informasi laba usaha. Penelitian ini tidak membahas aspek pemasaran, strategi penjualan, maupun analisis laporan keuangan usaha secara keseluruhan, melainkan hanya difokuskan pada perlakuan biaya indukan sebagai aset biologis dalam perhitungan harga pokok produksi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perlakuan aset biologis indukan dalam perhitungan harga pokok produksi menggunakan pendekatan *full costing* pada usaha budidaya ikan koi milik Komang Sudirpa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis alokasi biaya aset biologis indukan dalam perhitungan harga pokok produksi menggunakan pendekatan *full costing* pada usaha budidaya ikan koi milik Komang Sudirpa.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi biaya dan akuntansi manajemen pada sektor budidaya perikanan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai perlakuan akuntansi dan pengalokasian biaya indukan sebagai aset biologis dalam perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode full costing.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pelaku Usaha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya perlakuan dan pengalokasian biaya indukan sebagai aset biologis dalam perhitungan harga pokok produksi. Dengan pengalokasian biaya yang tepat, informasi biaya produksi yang dihasilkan menjadi lebih akurat sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penetapan harga jual, perencanaan biaya, serta evaluasi laba usaha.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya mengenai perlakuan akuntansi dan pengalokasian biaya aset biologis dalam perhitungan harga pokok produksi, khususnya pada usaha budidaya perikanan maupun sektor agrikultur lainnya.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi akademik mengenai penerapan akuntansi biaya serta perlakuan akuntansi aset biologis dalam perhitungan harga pokok produksi pada usaha budidaya perikanan, sehingga dapat menjadi bahan pengembangan kajian dan pembelajaran di bidang akuntansi.